

KINERJA APBD DAN CELAH PENYIMPANGANNYA

Ismail Amir

Dewan Nasional FITRA

(Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran)

Jakarta, Sumut, Riau, Sumsel, Kalbar, Kaltim, Jabar,
Jateng, Jatim, Sulsel, NTB.

TUJUAN DIDIRIKANNYA NEGARA RI

Pembukaan UUD 1945

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- Memajukan kesejahteraan umum
- Mencerdaskan kehidupan bangsa
- Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Misi Utama Pemda, Mencapai tujuan Desentralisasi :

- Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
- Peningkatan Pelayanan Publik
Utamanya Pelayanan Dasar Kepada Masyarakat
- Daya Saing Daerah Meningkatkan
(Unggulan Daerah)
- Pengembangan Kehidupan Demokrasi
(GOOD GOVERNANCE)

NEGARA HADIR UNTUK :

- **KESEJAHTERAAN/KEMAKMURAN**
- **KEADILAN**

Melalui 2 instrumen :

1. **REGULASI**
2. **ANGGARAN**

Penganggaran

- **Proses Teknokratis** (*penyusunan RKPD - Renja SKPD - KUA PPAS - RKA SKPD - APBD – Penjabaran APBD dll*)
- **Proses Politis** (*Musrenbang, sosialisasi, Konsultasi publik, kesepakatan KUA-PPAS, legislasi APBD dll*)

APBD

Pengertian administratif :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pengertian politik :

Kerangka Pemerintahan Demokrasi menempatkan Anggaran Daerah sebagai **amanah rakyat** yang dititipkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif daerah untuk dikelola demi **kesejahteraan rakyat**.

Dari mana Sumber Anggaran ?

- Pajak → Dipungut dari rakyat/ masyarakat.
- Restribusi → Dipungut dari rakyat/ masyarakat
- Laba BUMN/D → Pengelolaannya dibiayai uang rakyat
- Hutang → Menjadi beban rakyat
- Hibah → Karena ada kepentingan rakyat

Jadi :

- 1. Uang negara bersumber dari rakyat/masyarakat.
- 2. Negara/pemerintah pengelola uang rakyat

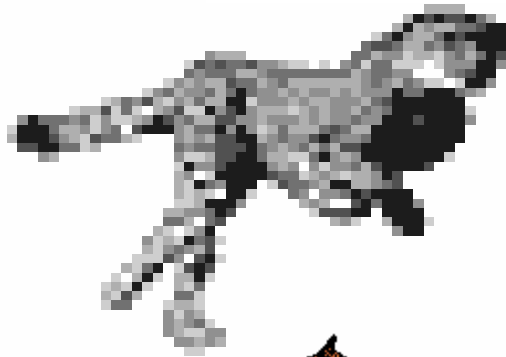
HAK DAN KEWAJIBAN

	RAKYAT	PEMERINTAH
PENDAPATAN	KEWAJIBAN	HAK
BELANJA	HAK	KEWAJIBAN

Proses Penganggaran



PROBLEM TATA KELOLA ANGGARAN KITA



Tipologi Daerah menurut perspektif kesejahteraan







TEMPO/GUNAWAN WICAKSONO



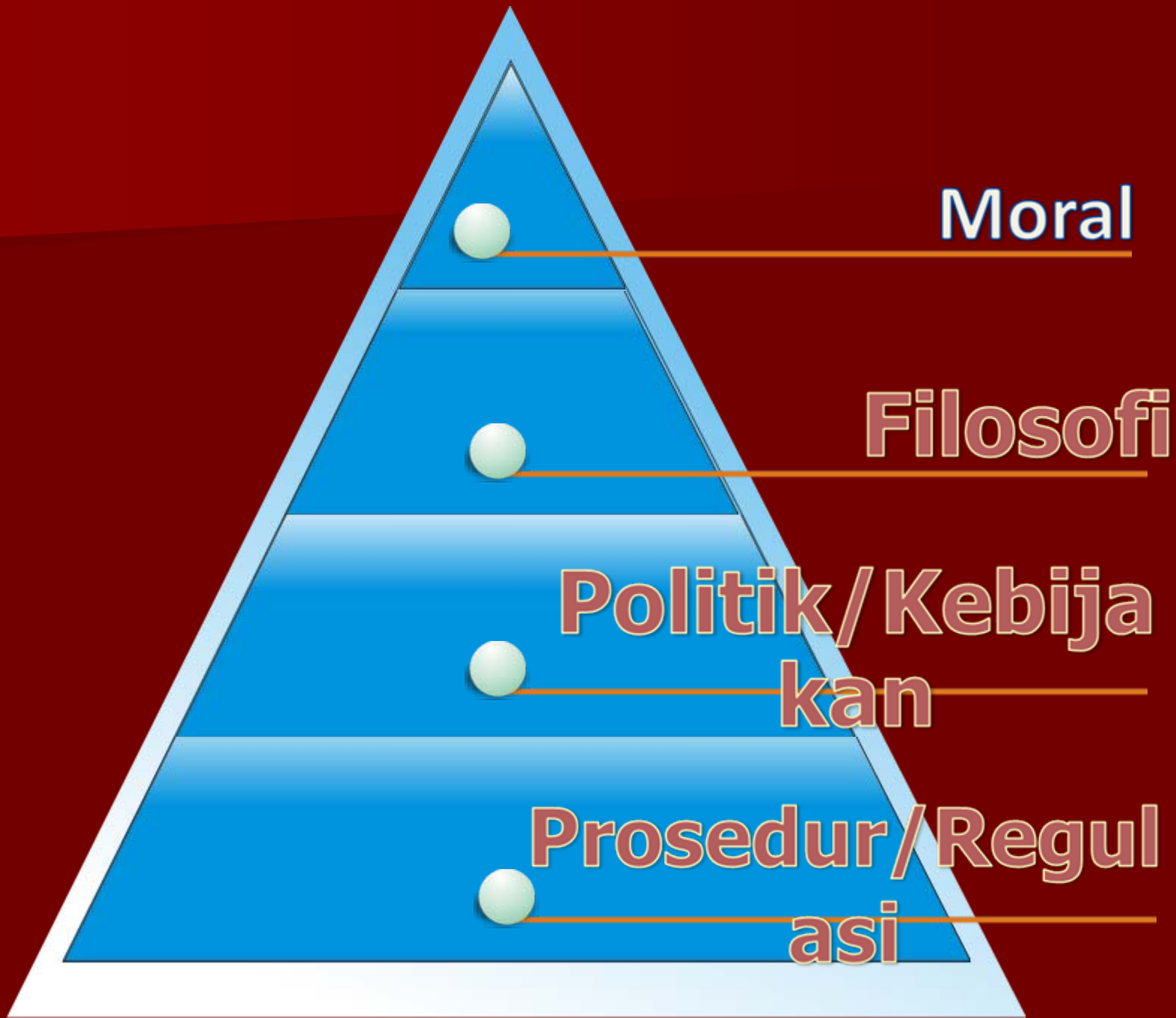


Nasib sudah pasti

**Nasib Tidak Tentu
Nanti Tuhan Tolong**







Temuan KIPAD 2010

(Kinerja Pengelolaan Anggaran daerah)

Seknas FITRA

42 Kabupaten / Kota

DAERAH-DAERAH PENELITIAN KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH 2010

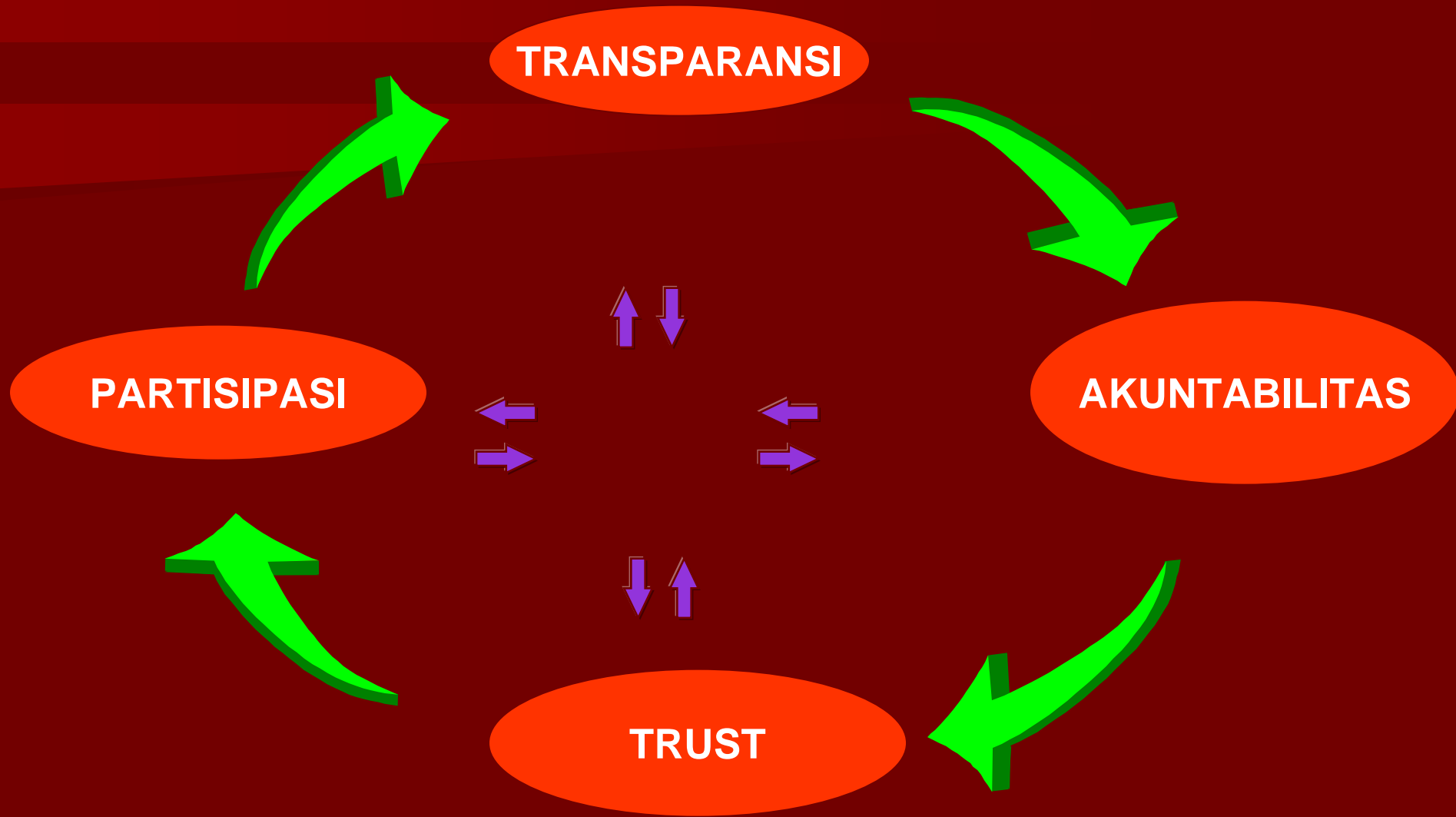


STUDI TENTANG :

Kinerja Pengelolaan Anggaran Daerah

- **Tranparansi, Akuntabilitas, Partisipasi dan kesetaraan.**
- **Analisis Anggaran daerah (2007 – 2010)**

Pengelolaan Anggaran

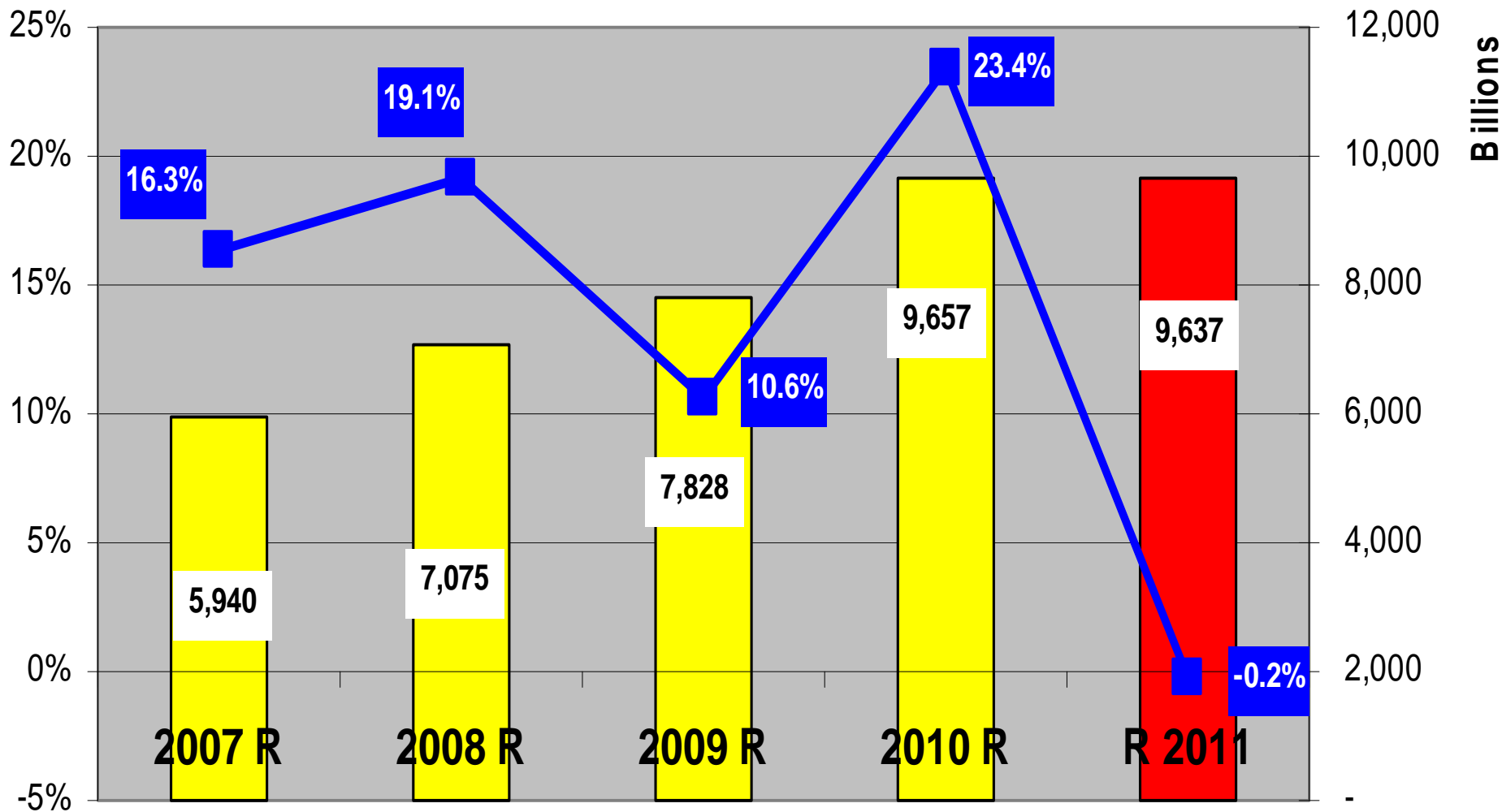


Kinerja Pendapatan Daerah

Sumber Pendapatan daerah

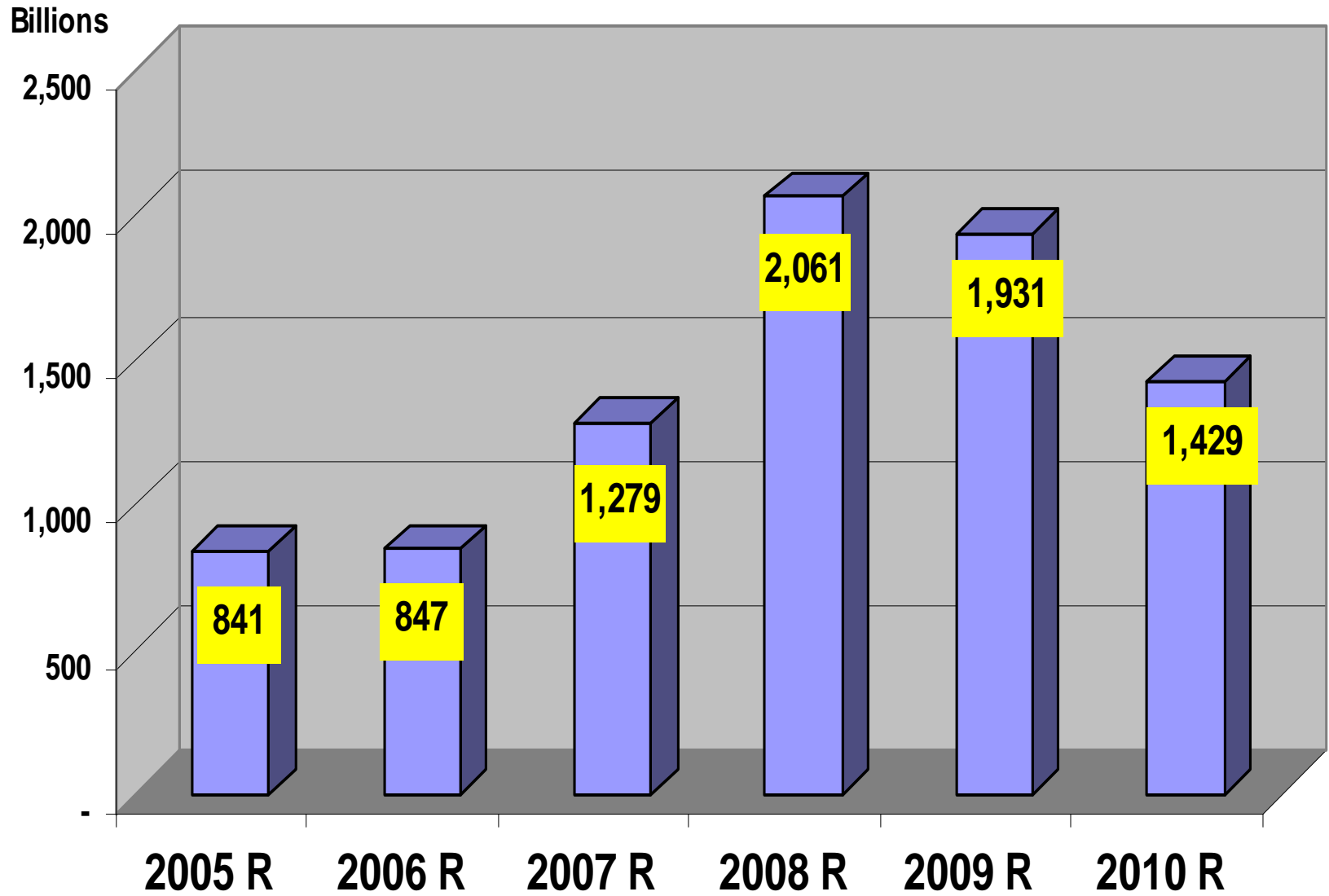
- PAD
- Dana Perimbangan
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

PENDAPATAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN PROV. JATIM

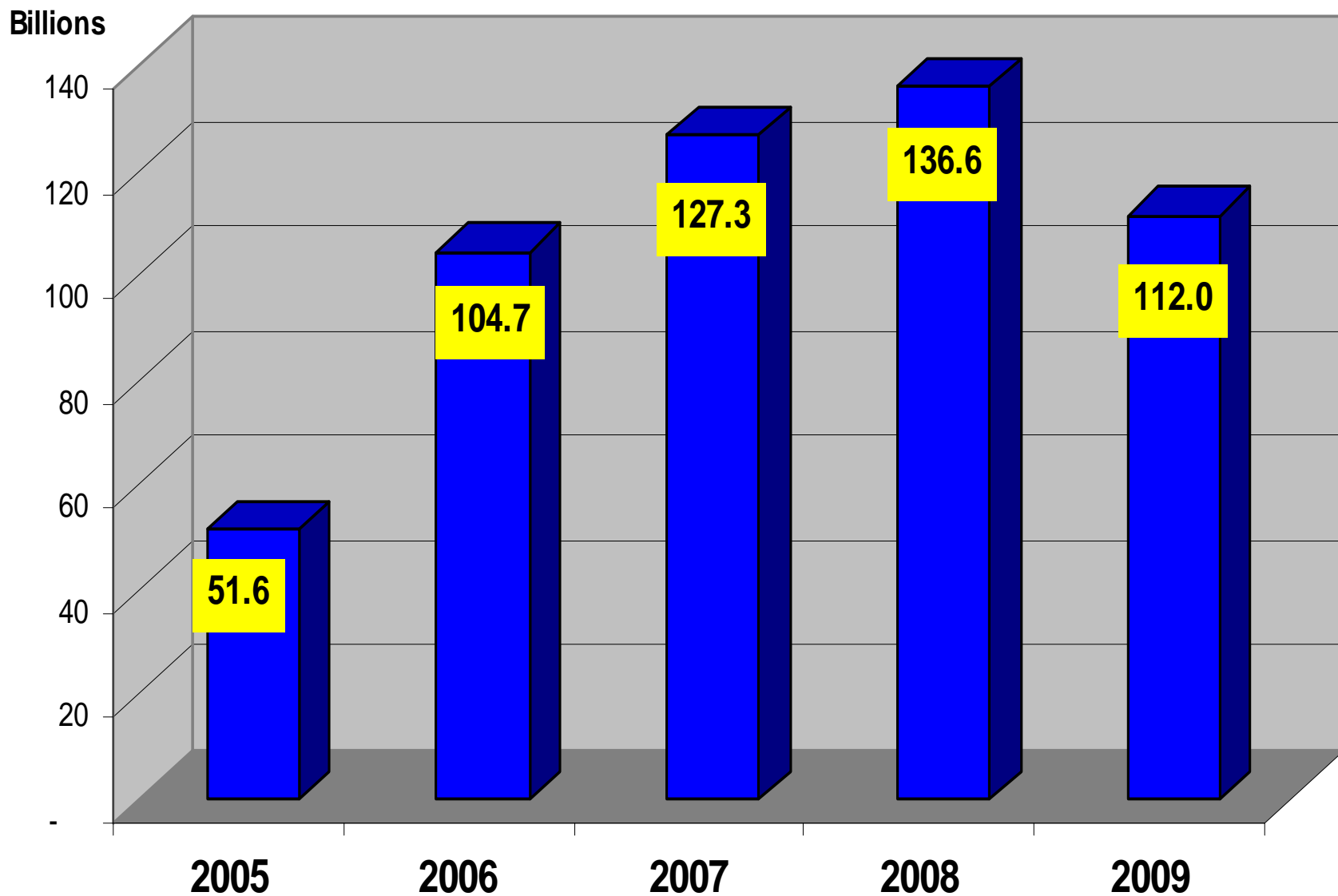


■ PENDAPATAN DAERAH NOMINAL **—■— PERTUMBUHAN NOMINAL**

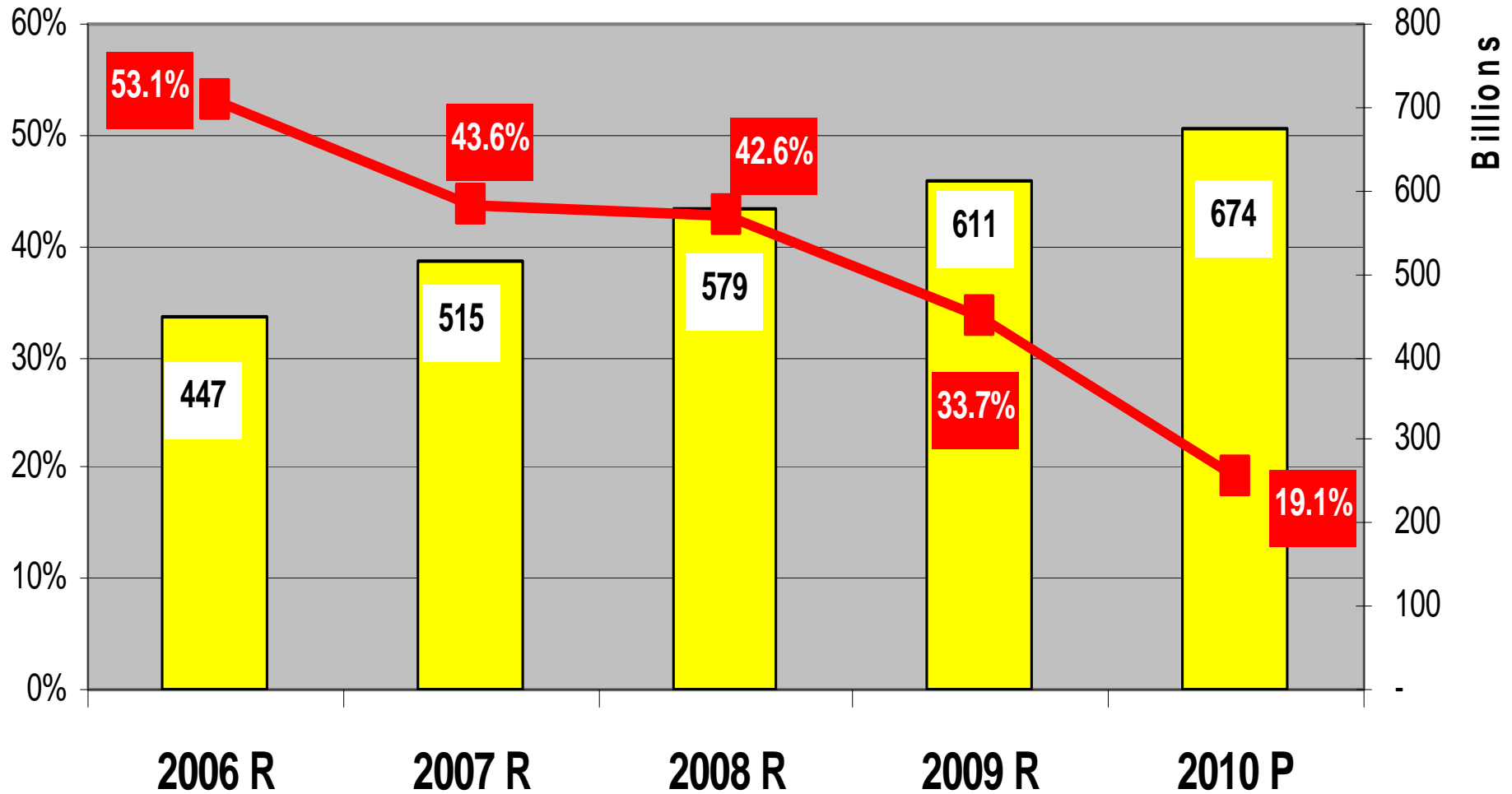
SILPA PROVINSI JATIM



TREN SILPA SITUBONDO

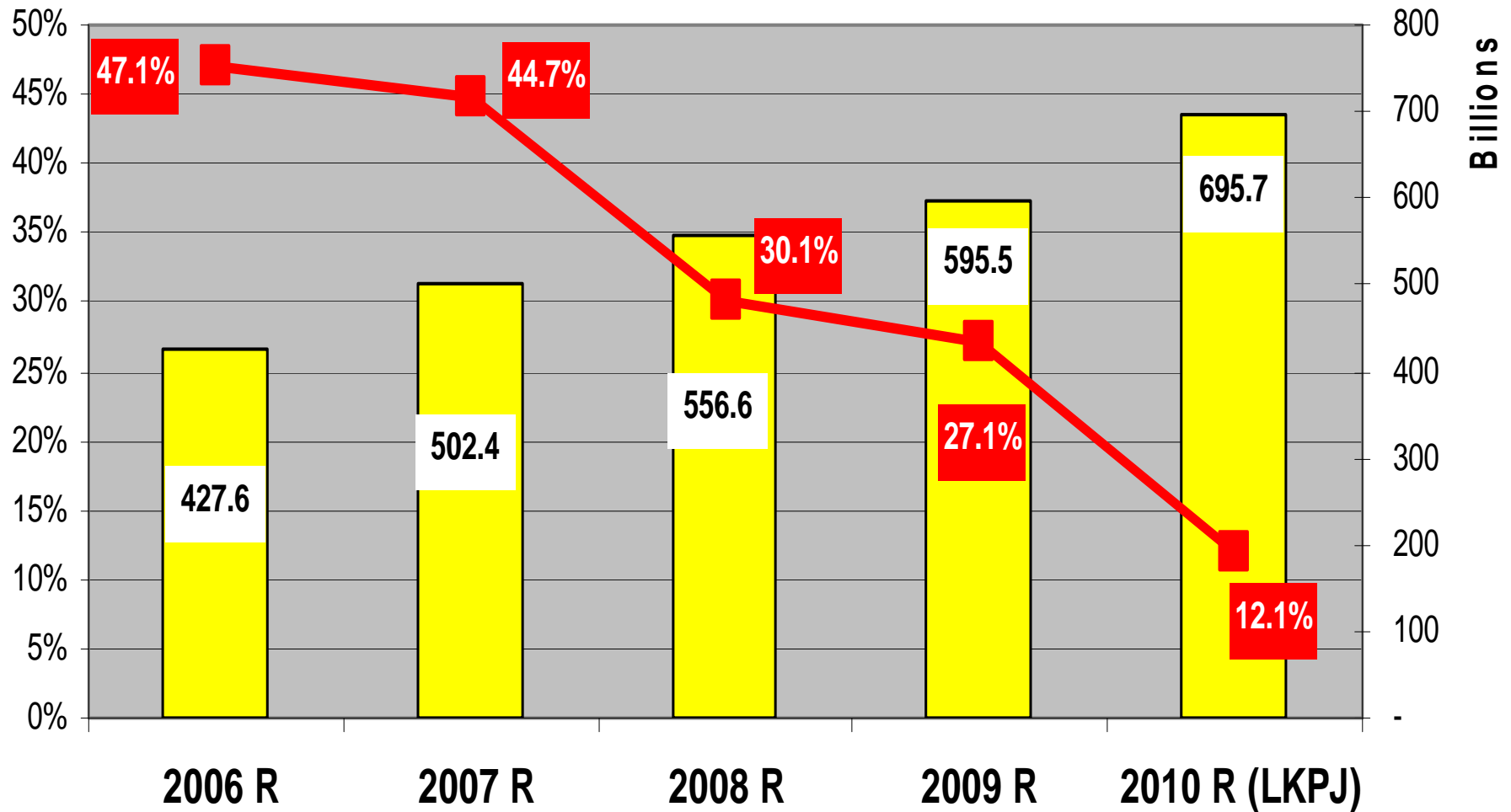


TREN PENDAPATAN DAN DISKRESI FISKAL SITUBONDO



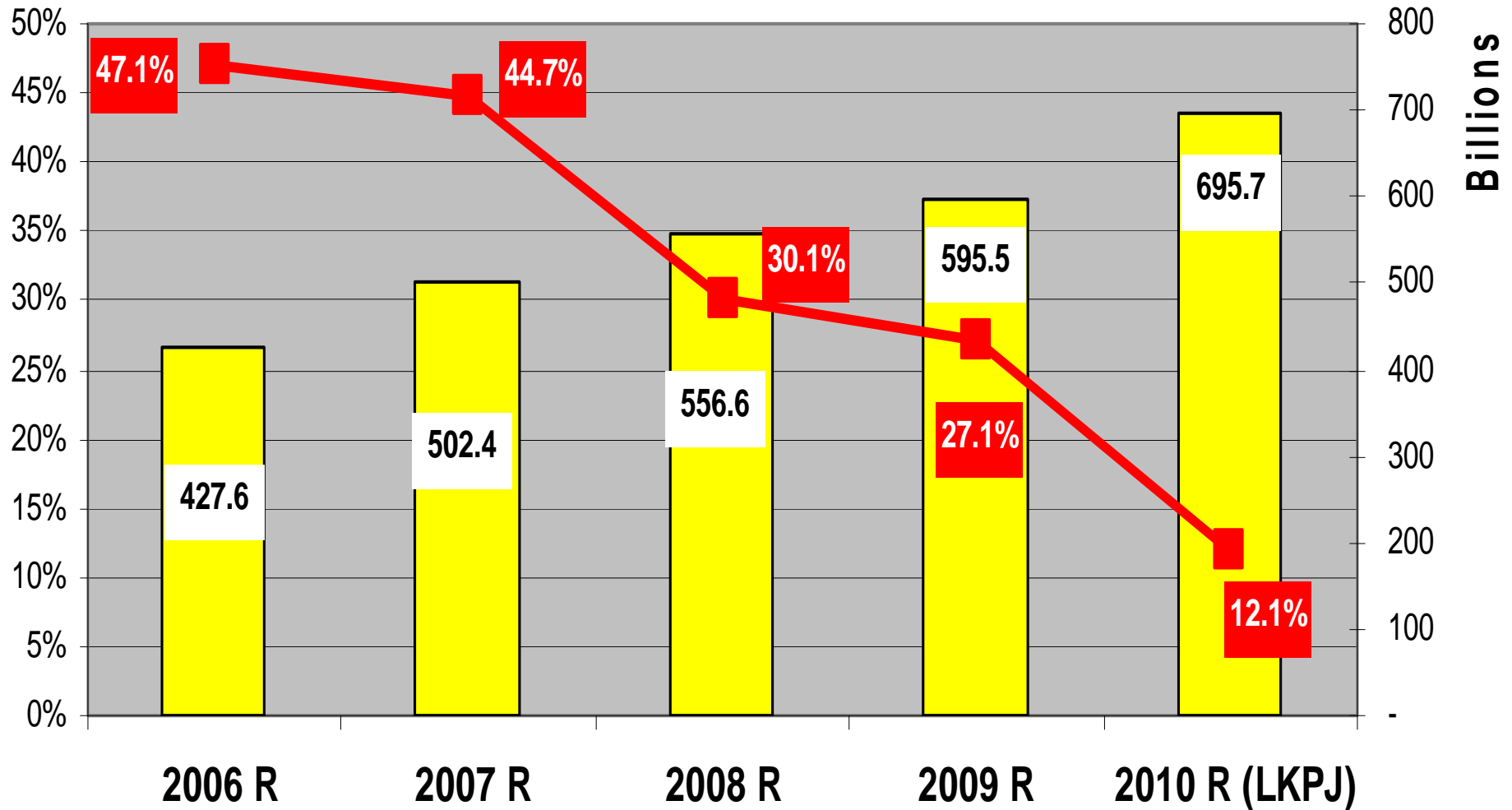
■ PENDAPATAN DAERAH —■ DISKRESI FISKAL

TREN PENDAPATAN DAN DISKRESI FISKAL PACITAN



■ Pendapatan Nominal —■ Diskresi Fiskal %

TREN PENDAPATAN DAN DISKRESI FISKAL PACITAN



 Pendapatan Nominal  Diskresi Fiskal %

KINERJA BELANJA DAERAH

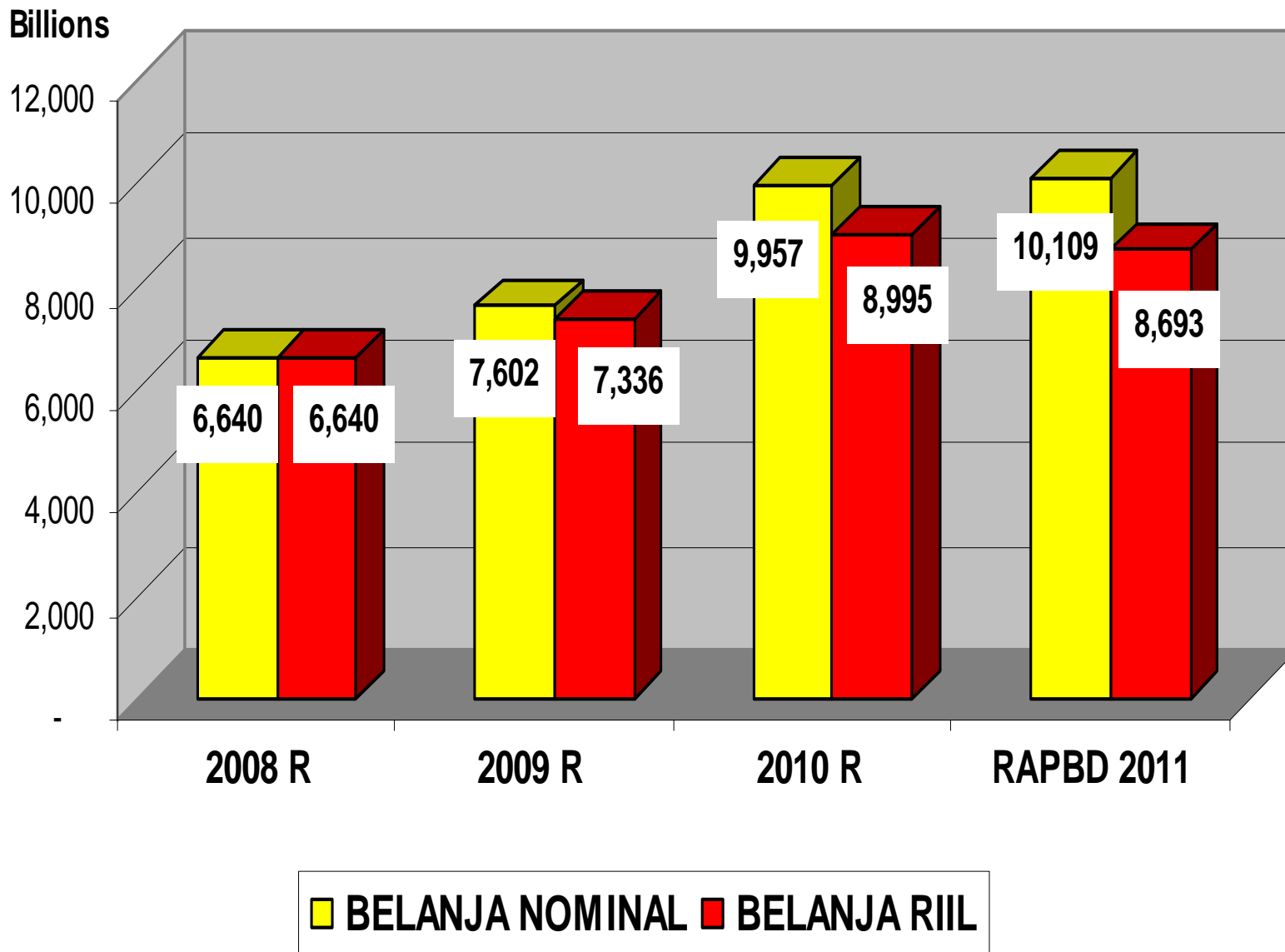
BELANJA TIDAK LANGSUNG

- Belanja Pegawai
- Belanja Bunga
- Belanja Subsidi
- Belanja Hibah
- Bantuan Sosial
- Bagi hasil kepada Desa/Kab/Kota
- Bantuan Keuangan kpd Desa
- Belanja Tidak tersangka

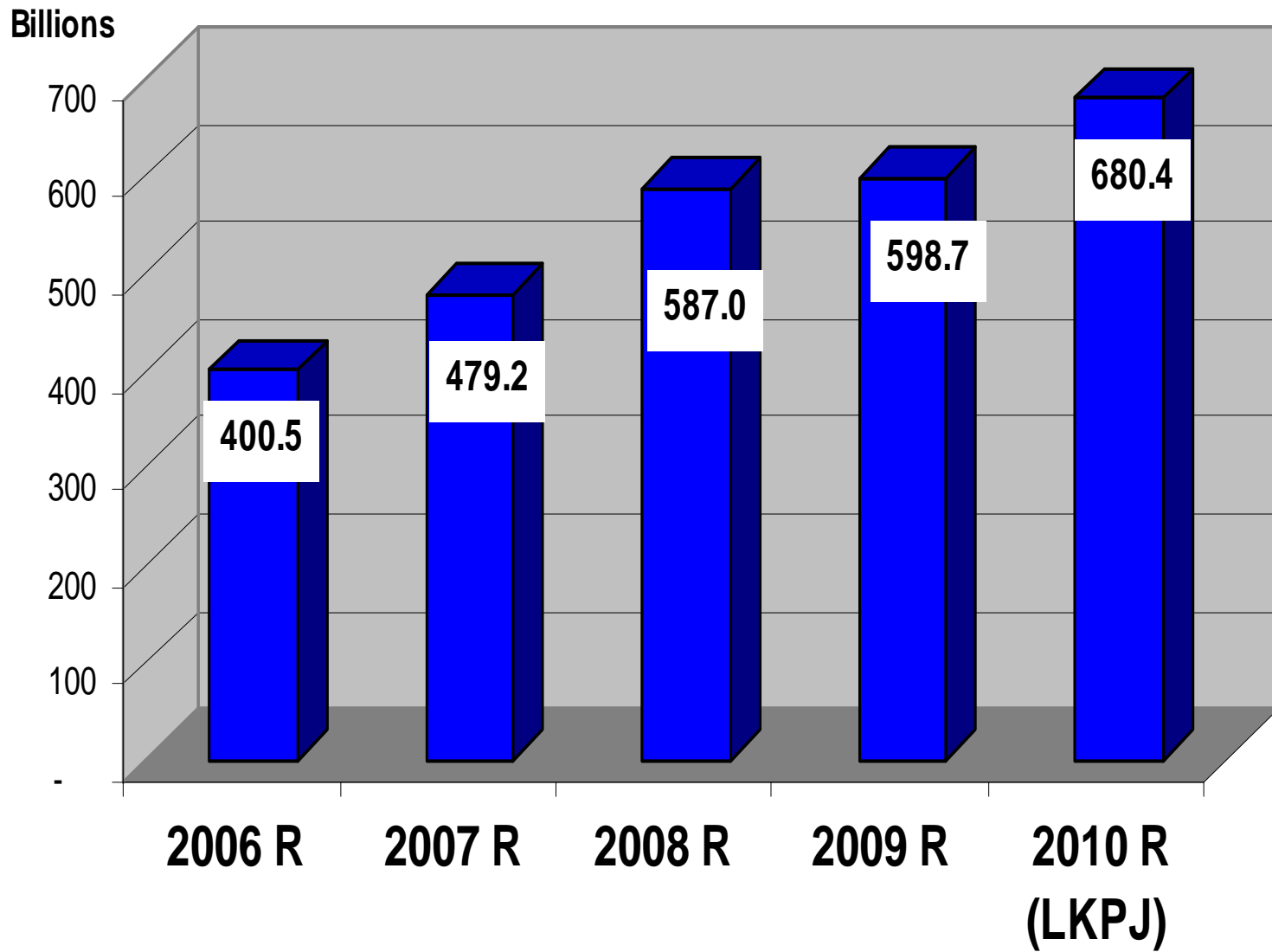
BELANJA LANGSUNG

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan jasa
- Belanja Modal

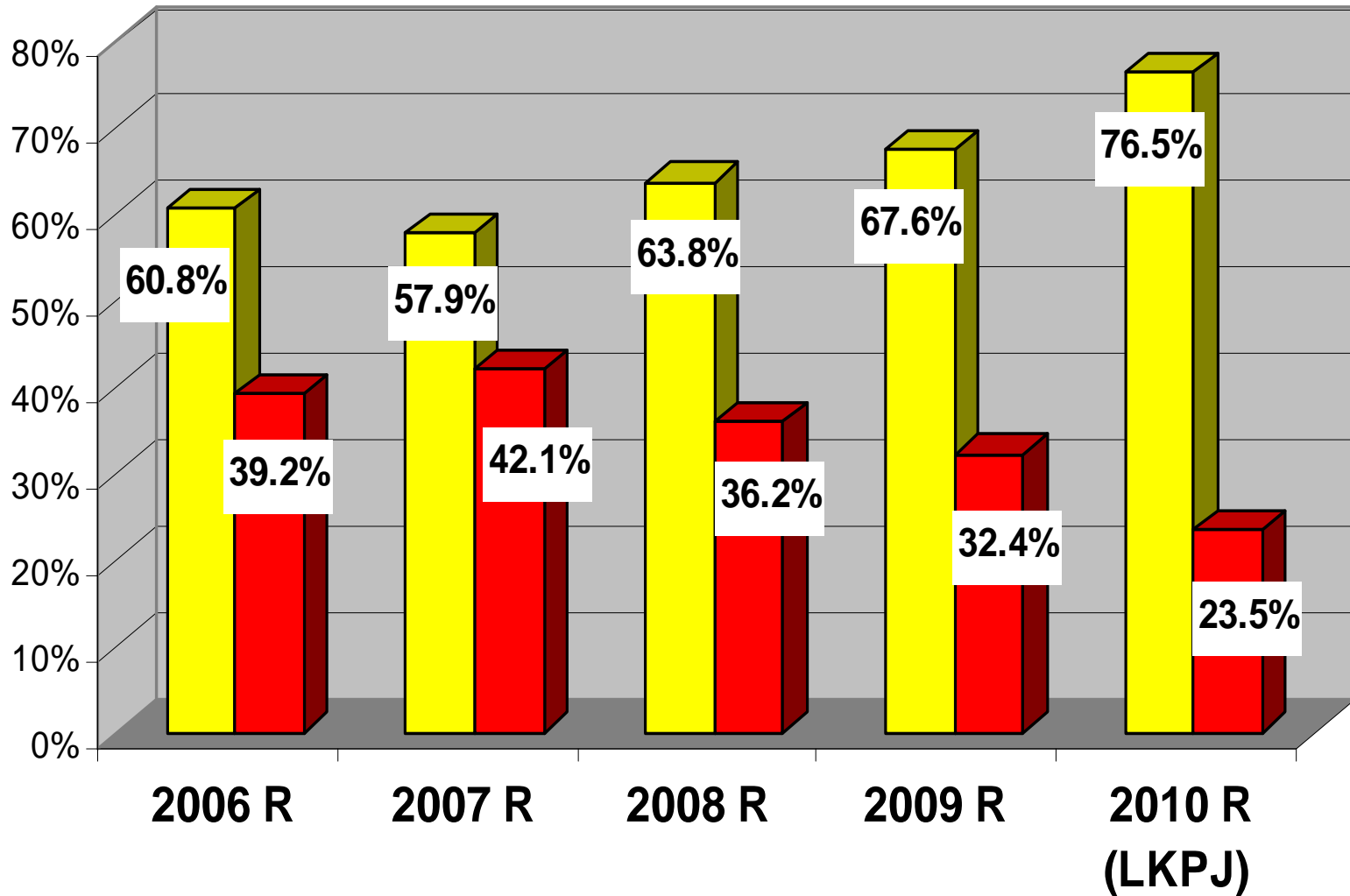
BELANJA JATIM NOMINAL DAN RIIL



TREN BELANJA DAERAH KAB. PACITAN

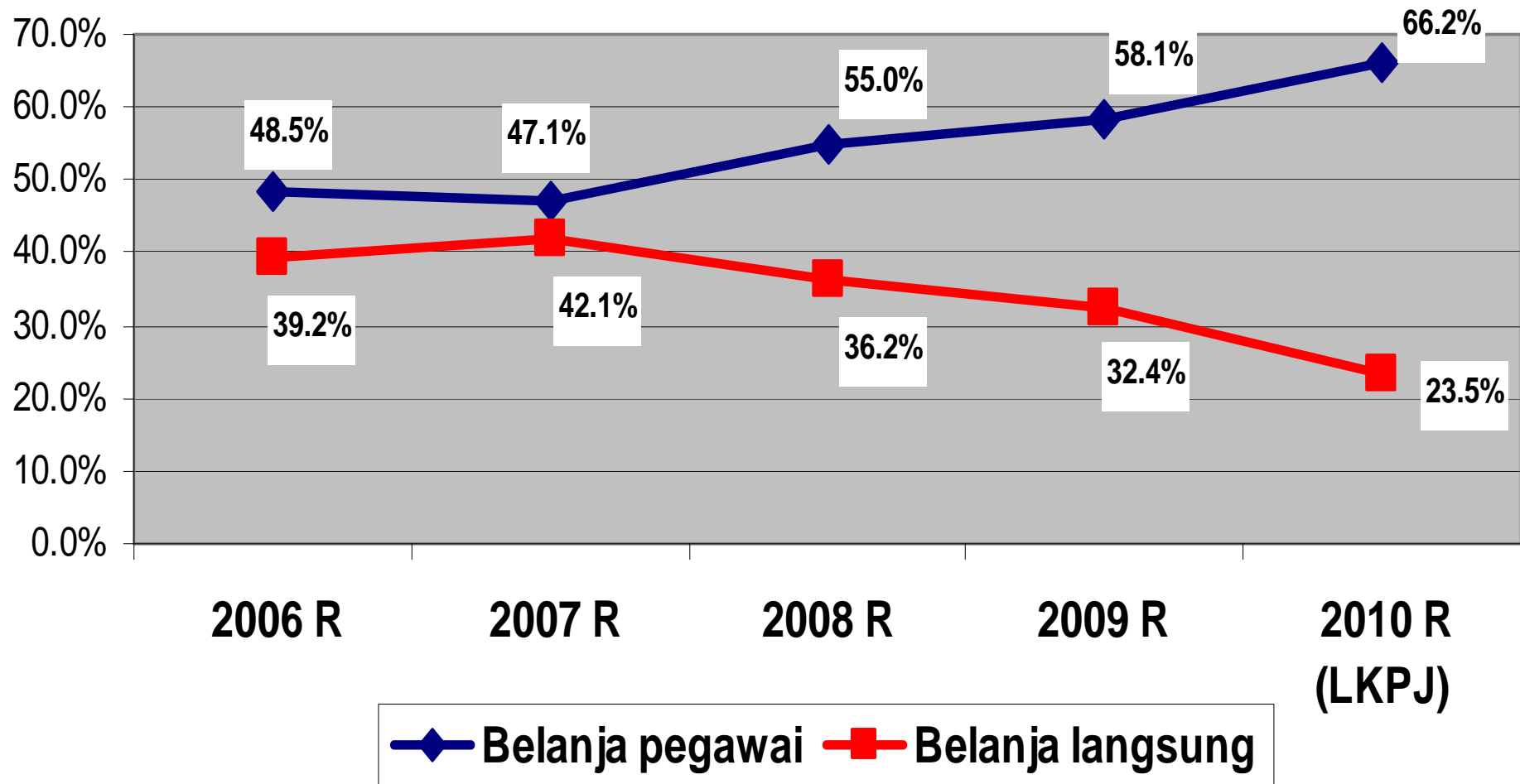


PROPORSI BELANJA DAERAH



■ Belanja tidak langsung ■ Belanja langsung

KOMPOSISI BELANJA PEGAWAI Vs BELANJA LANGSUNG PACITAN



Tingkatan Orientasi program/kegiatan (pelayanan publik dasar /Pendidikan - kesehatan)



TERIMA KASIH